



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI WINANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFES**
3. NHK : **134548**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.086.493.000</b>
1. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 759.375.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 475.998.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/140 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 169.520.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 742 m2/391 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 1.008.600.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 673.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>348.400.000</b>
1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 15 RS CVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 166.000.000		
3. MOBIL, HONDA HRVRU1 1.5 ECVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 179.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.250.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>312.000.000</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.874.143.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.874.143.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.